



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUNAFRI ARIFUDDIN**
2. Jabatan : **WALIKOTA**
3. NHK : **401279**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 13.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 167 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/160 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/80 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/80 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/95 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/80 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m²/80 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
8. Tanah Seluas 3443 m² di KAB / KOTA MAJENE, HASIL SENDIRI Rp. 3.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 900.000.000**

1. MOBIL, MITSHUBISHI SPORT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000



2. MOBIL, MERC BENZ JEEP L.C Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
750.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.600.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.172.882.948
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	19.672.882.948
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	19.672.882.948

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.